



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

# LAPORAN MONITORING KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

*Triwulan I 2023*

**LAPORAN MONITORING KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PERIODE TRIWULAN I  
TAHUN 2023**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

### PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Persentase)	Target	Realisasi (Persentase)	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai	Persentase Capaian	Keterangan
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel</b>	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<b>80,00%</b>	11	<b>72,73%</b>	8	Tidak Tercapai	90,91%	Perkara Putus Triwulan I 2023 = 11 Perkara, Perkara Putus yang tepat waktu = 8 Perkara
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<b>60,00%</b>	11	<b>18,18%</b>	2	Tidak Tercapai	30,3%	Perkara Putus Triwulan I 2023 = 11 Perkara, Perkara Putus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding = 2 Perkara
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	0	<b>0,00%</b>	0	Tercapai	0,00%	Perhitungan dilakukan tiap 1 tahun
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<b>100,00%</b>	5	<b>100,00%</b>	5	Tercapai	100,00%	Jumlah Responden IKM / Kepuasan Pelayanan Publik s.d Triwulan I = 5 Reponden
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	<b>80,00%</b>	11	<b>81,82%</b>	9	Tercapai	102,27%	salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu = 9
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi</b>	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<b>100,00%</b>	0	<b>0,00%</b>	0	Tidak Tercapai	0,00%	Tidak terdapat perkara prodeo pada Triwulan I 2023

<b>Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<b>100,00%</b>	24	<b>91,67%</b>	22	Tercapai	96,67%	Jumlah Pencari keadilan yang mendapat layanan Posbakum Triwulan I 2023 =22 orang
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	<b>5,00%</b>	4	<b>0,00%</b>	0	Tidak Tercapai	0,00%	Jumlah Perkara BHT Triwulan I = 4 perkara, Perkara BHT Triwulan I 2023, yang ditindaklanjuti Triwulan I tahun 2023 = 0 Perkara
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	<b>10,00%</b>	4	<b>25,00%</b>	1	Tercapai	250,00%	Jumlah Perkara BHT Triwulan I = 4 perkara, Perkara BHT Triwulan I 2023, yang dimohonkan eksekusi Triwulan I tahun 2023 = 1 Perkara
<b>Meningkatnya Transpransi Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	<b>15,00%</b>	6.134.752.000	<b>20,84%</b>	1.278.337.521	Tercapai	138,93%	PAGU Anggaran DIPA 01= 6.134.752.000, Realisasi DIPA 01 = 1.278.337.521
	Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	<b>15,00%</b>	36.400.000	<b>18,75%</b>	6.823.500	Tercapai	125%	PAGU Anggaran DIPA 05= 36.400.000, Realisasi DIPA 05 = 6.823.500





## KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No	Kegiatan	Anggaran
1	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</i>	<i>Rp.6.134.752.000,-</i>
2	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>	<i>Rp.5.000.000,-</i>
3	<i>Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara</i>	<i>Rp.36.400.000,-</i>

Samarinda, 6 April 2023

E T U A, *ET*



ELIZABETH L. L. TOBING, S.H., M.Hum.  
NIP. 197607052000032002